

NOTULENSI

No.			
1	Tempat Pelaksanaan	:	Plenary Hall, JCC
2	Hari/ Tanggal	:	Rabu, 6 November 2019
3	Waktu Pelaksanaan	:	Pukul 13.00 s.d. 15.00
4	Agenda	:	Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa
5.	Peserta	:	Terlampir

Notulensi Panel Diskusi 1:

1. Philia Wibowo (McKinsey & Company)

- McKinsey di Indonesia sudah hadir 25 tahun dan memiliki sekitar ± 150 kolega dan sekitar 50% perusahaan-perusahaan besar di Indonesia telah disservice oleh kami sebagai konsultan SDM.
- Pertambahan PDB di Indonesia yang mencapai 120 Miliar sampai dengan tahun 2025, menunjukkan peningkatan pada aspek manufaktur, penjualan, layanan transportasi, dll.
- Penyebabnya antara lain adalah banyaknya tugas bukan pekerjaan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam dunia kerja, khususnya terkait dengan SDM.
- Dampak yang signifikan terjadi di negara kita dikarenakan negara kita masuk dalam kategori ekonomi tumbuh dan pembangunan infrastruktur yang sangat masif.
- Ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan dengan mesin, namun ada beberapa lapangan pekerjaan yang bisa tercipta karena tuntutan waktu, yang menimbulkan istilah job lose, job gain.
- Dalam menyikapi transformasi digital ini dalam rangka menyiapkan SDM Unggul, maka perlu disiapkan beberapa hal, antara lain:
 - a) Menyesuaikan dengan pembangunan mental pekerja
 - b) Memperoleh skill yang disesuaikan dengan permintaan
 - c) Harus selalu terbiasa untuk terus belajar
 - d) Menyiapkan lapangan pekerjaan di era digital
 - e) Memperhitungkan metode pekerjaan yang baru

2. Bernard Gracia (EIPM Founder & President)

- Saat ini hampir di seluruh dunia terjadi Era Vuca (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) yang berdampaknya pula transformasi dalam dunia pengadaan.
- Transformasi digital mempengaruhi budaya dalam pengadaan, dimana saat ini pengadaan barang/jasa harus sudah terakomodir dengan dunia digital.
- Sehingga diperlukan SDM yang siap mengakomodir dunia pengadaan secara digital.
- Perlu adanya kolaborasi dan penggabungan antar unit-unit kebutuhan terhadap dunia pengadaan secara digital.
- Teknologi yang datang dengan cepat, sehingga diperlukan SDM yang growth zone bukan yang comfort zone yang masih menggunakan praktik-praktik lama.
- Dunia pengadaan harus memiliki tactical buying, dimana harus memberikan kemudahan akses dalam rangka proses transaksi.
- Di era digital saat ini sangatlah mudah dalam menentukan arah kedepan dan pengambilan keputusan melalui pengolahan big data.
- Selaras dengan tema acara ini yang menitikberatkan pada Transformasi Digital untuk SDM Unggul, maka perlunya kompetensi SDM pengadaan yang mampu mengaplikasikan dunia digital dalam rangka memajukan negara kita.
- Untuk itu diperlukan values for values dalam memasuki era dunia digital baik itu SDM, maupun aspek-aspek lain yang terlibat dalam dunia pengadaan.

3. Onno W Purbo (Praktisi TI)

- Kalau tadi dua pembicara banyak mempresentasikan bagaimana menyiapkan SDM Unggul, kali ini saya akan berbicara mengenai tren saat ini yaitu big data.
- Sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam menghadapi era digital, maka diperlukan keahlian dalam pengoperasian dunia digital, khususnya dalam memudahkan prediksi dan pengambilan kebijakan, maka diperlukan suatu tools yang mampu mengolah keseluruhan data yang berskala besar.
- Google adalah salah satu search engine (mesin pencari) yang mampu menghasilkan data yang akurat dan cepat, salah satunya adalah google maps, dimana google maps mampu memprediksi suatu perjalanan berdasarkan rekaman aktifitas pengguna, dengan didukung data-data lain.
- Seperti contoh hari ini saya ingin melihat bagaimana cuaca di Bandung dan lama perjalanan yang ditempuh dari Jakarta - Bandung.
- Saya akan mempraktikkan pengelolaan data menggunakan persamaan linier pada deep learning.
- Menggunakan tools aplikasi Orange for data mining dan mengambil sample berupa data marketing sales untuk melihat perkembangan setiap minggu dan pengambilan keputusannya.

Pertanyaan dan Jawaban dari Sesi Diskusi Panel 1

- Bagaimana memunculkan life long learning?
Banyak cara yang bisa dilakukan dan adanya beberapa faktor yang mendukung salah satunya menggunakan pendekatan yang disebut framework influence model, dimana memberikan contoh kepada orang yang ingin dipengaruhi
Serta pemberian pembekalan skill, reward dan konskuensi yang diterima serta role modelnya (bentuknya birokrasi yang panjang atau tidak)
- Bagaimana keamanan informasi dari Big Data?
Tidak ada yang aman semuanya terekam dengan jelas, dan karena datanya besar sehingga diperlukan literasi yang tinggi dalam rangka menangkal hoax
- Aplikasi yang digunakan dalam pengolah big data?
Menggunakan aplikasi Orange for data mining
- Bagaimana memperlakukan standar keamanan pada digital procurement?
Harus dibangun suatu trust dan standar keamanan yang berdasarkan standar baik berupa ISO 270001, dan model standar-standar keamanan lainnya.

Penutup

- Philia Wibowo
semua bisa dipelajari dan dalam menghadapi transformasi era digital diperlukan kemampuan dalam menguasai dunia digital dan mempersiapkan SDM yang bertalenta digital.
- Bernard Gracia
Terus belajar dan terus berusaha untuk selalu meningkatkan kapasitas SDM Pengadaan yang Unggul sehingga mampu menghadapi era digital yang terus bergerak seperti mesin
- Onno W Purbo
Indonesia sangatlah hebat, LKPP khususnya mengembangkan aplikasi pengadaan yang dihasilkan oleh anak bangsa sehingga perlu dijaga trust dan standar keamanan dan tetap terus berinovasi

NOTULENSI

No.			
1	Tempat Pelaksanaan	:	Plenary Hall, JCC
2	Hari/ Tanggal	:	Rabu, 6 November 2019
3	Waktu Pelaksanaan	:	Pukul 15.00 s.d. 17.00
4	Agenda	:	Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa
5.	Peserta	:	Terlampir

Notulensi Panel Diskusi 2:

1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

- Inovasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada beberapa macam, antara lain:
 - E-procurement
 - Toko Daring
 - Tender Cepat
 - E-purchasing/E-katalog
 - Ereverse Auction
 - SIKAP
 - KPBU
 - SPP/GPP
 - Tender/Seleksi Internasional
- Namun pada sesi ini, saya ingin menyampaikan terkait aturan yang ada Perpres 16/2018 yaitu mengenai pemanfaatan hasil penelitian untuk pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Hal ini selaras dengan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemanfaatan hasil penelitian pada Peraturan Presiden No.16/2018 Pasal 4 huruf e yang bertujuan untuk Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian, Pasal 5 huruf h yang Mendorong Pelaksanaan Penelitian dan Industri Kreatif dan diatur dalam satu pasal khusus pada Pasal 62.
- Perpres 16/2018 yang mendukung pemanfaatan hasil inovasi penelitian selaras pula dengan UU No.11/2019 tentang SISNASIPTEK dimana pemerintah pusat menjamin pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam bentuk Inovasi dan Inovasi untuk pembangunan nasional.
- Dikarenakan dana penelitian ini menggunakan APBN, maka harus menjadi prioritas bagi UKPBJ untuk dibeli barangnya, dalam rangka memberdayakan hasil-hasil riset dan menciptakan nilai best value for money.
- Penyerahan pekerjaan pada ahlinya dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana ketentuannya dapat diatur berdasarkan kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha, dan bisa diatur pula mengenai nilai kerjasama dan investasi yang diinginkan.
- Selain KPBU ada juga Sustainable green public procurement, dan kerjasama internasional.

2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi


- Dari pagi kita sudah berbicara mengenai transformasi pengadaan, saat ini kami Kedeputusan Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi mengenai transformasi pengadaan yang telah dilakukan di Kedeputusan kami.
- Paradigma baru pada aturan pengadaan sudah melakukan kompetisi yang terbuka dan terakomodirnya proses konsolidasi pengadaan.
- Tinggal proses Procure to Pay (P2P) yang akan dilaksanakan segera, sehingga proses pengadaan jauh lebih cepat dikarenakan pembayarannya sudah langsung link ke kas negara atau kas daerah.
- Saat ini kita masuk ke era cognitive procurement dimana tidak menghilangkan job, melainkan mempermudah job tersebut.

- Arah kedepan pengadaan dapat diramal dengan data, sehingga asset data sangatlah penting bagi kemajuan pengadaan.
 - Saat ini kita lihat Data Digital di tahun 2019, yang berdasarkan pada data tren digital dunia dan tren digital Indonesia.
 - 1/3 waktu kita sehari digunakan untuk bersosial media, rasanya tidak menjadi hambatan bagi kita untuk berinteraksi pada teknologi.
 - Tren pengadaan dunia saat ini adalah mengkolaborasikan seluruh stakeholder yang berkepentingan untuk sama-sama memajukan pengadaan di Indonesia melalui investasi pada teknologi dan SDM.
 - Arah kedepannya akan dilakukan pengembangan dan peningkatan SDM dan juga aplikasi pendukung lainnya guna diperolehnya kemudahan dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan akurat.
 - Serta pengambilan data dari social media guna memperoleh saran dan masukan untuk pengadaan kedepannya.
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
- Transformasi pengadaan dari Tactical menuju Strategic
 - Pengaruhnya terjadi pada fungsi pengadaan yang tidak sekedar sebagai tukang lelang tapi sudah mencakup dengan perencanaan dan peningkatan SDM PBJ dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung seluruh proses PBJ
 - Desain Kelembagaan PBJ dalam rangka memenuhi tingkat kematangan UKPBJ, maka telah terbit aturan yang mendukung peningkatan kematangan kelembagaan UKPBJ serta fungsi-fungsi lain yang mendukung seperti yang ada pada Perpres 16/2018 dan ditambah dengan Agen Pengadaan dan Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan.
 - Desain Karir SDM PBJ seluruhnya sudah di desain menggunakan pola karir yaitu JF PPBJ, dan adapun proses karirnya sudah menggunakan teknologi informasi mulai dari ujian dasar maupun uji kompetensi.
 - Saat ini jumlah JF PPBJ belum sesuai dengan target yang ditentukan, untuk itu kami mendorong untuk segera membentuk JF PPBJ agar seluruh proses pengadaan dapat dilakukan oleh yang kompeten.
 - Terdapat tantangan implementasi dan peluang apabila PBJ dikelola oleh yang ahlinya, antara lain: Komitmen Pimpinan, Kolaborasi pihak terkait, anggaran dan peluangnya antara lain kebijakan penghapusan eselon III dan IV sehingga mampu mendorong pengelola PBJ untuk masuk ke Jabfung dan Penilaian kelembagaan belum masuk dalam penilaian RB/LAKIP.
4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja
- Perlunya mendorong perencanaan pengadaan yang lebih konsolidatif.
 - Ke depan arah diskusi PBJ lebih membicarakan bagaimana perencanaan pengadaan yang matang, mulai pembahasan produk per produk, komponen per komponen dll.
 - Saat ini akan dibangun clearing house dimana akan mempermudah UKPBJ dalam pemberian advokasi.
 - Serta saat ini lagi digalangkan dukungan penegakan hukum melalui persamaan persepsi antara APH, APIP dan LKPP
5. Sekretaris Utama
- Mensupport empat kedeputan yang ada.
 - Jangan hanya monoton dengan rutinitas dan harus ada gebrakan.
 - Selama ini LKPP hanya teori saja dan tidak ada prakteknya, saat ini hal tersebut sudah kita lakukan, contohnya pada pelaksanaan Rakornas ini 3 PPK berkonsolidasi menjadi satu kegiatan yaitu Rakornas.
 - Layanan LKPP yang ke external akan dimaksimalkan menggunakan teknologi informasi.

Pertanyaan dan jawaban


1. Apakah akan ada JFT untuk LPSE?
Ada dan saat ini sedang dalam tahap kajian diskusi, dan akan di diskusikan bersama Kementerian PAN-RB
2. Bagaimana mengoptimalkan SDM PBJ? Mengingat jabfung di tempat kami masih kurang?
Saat ini sudah dibuka seleksi CPNS 2019 dan ini dapat mendorong K/L/Pemda untuk segera memiliki Jabfung yang dimana amanat Perpres 16/2018, seluruh proses pengadaan akan dilakukan oleh JF PPBJ pada tahun 2021, selain itu gunakan dengan maksimal program inpassing JF PPBJ.
3. Apa yang perlu dipersiapkan dalam rangka menghasilkan SDM Unggul di Era digital?
Untuk mendukung proses PBJP yang maju yang didukung dengan sistem dan teknologi, maka perlu SDM yang professional, ini dilakukan agar tidak mudah di intervensi oleh atasan
4. Apakah di aplikasi e-katalog sudah bisa menampilkan ketersediaan stok barang?
Untuk barang tertentu bisa untuk menampilkan ketersediaan stok barang, namun belum berlaku untuk seluruh barang dan juga sudah siapkan sistem rating penilaian penyedia, masih dalam proses pembahasan.

Mengetahui,
Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan


(Anita Carolin)

Jakarta, 6 November 2019

Notulis,


(Alex Gufron)

NOTULENSI RAPAT

Hari, Tanggal : Kamis, 7 November 2019
Pukul : 13.00 - selesai
Tempat : Ruang Cendrawasih, Gedung JCC - Jakarta

A. Latar Belakang

Kedeputan Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa diberikan tugas untuk mengisi kegiatan Rakornas Pengadaan 2019 yang diselenggarakan tanggal 6-7 November 2019 di JCC Jakarta. Terkait dengan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan diskusi panel pada tanggal 7 November 2019 dengan susunan acara sebagai berikut:

- Sesi 1: 13.00 – 14.20
Tema diskusi: Konsolidasi Pengadaan
- Sesi 2: 14.20 – 15.40
Tema diskusi: Transformasi Pengadaan Melalui Pemberdayaan Pelaku Usaha Lokal
- Sesi 3: 15.40 – 17.00
Tema diskusi: Inisiatif Masyarakat Sipil Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi dan Forum Kerjasama Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tipikor pada Penyelenggaraan Pemerintah

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Sesi 1: Konsolidasi Pengadaan

Pada sesi ini yang bertindak selaku moderator adalah Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I, Bpk. Yulianto Prihandoyo. Untuk sesi ini menghadirkan 2 narasumber, yakni:

- Ibu Christiana Sri Andayani, Ketua Pendamping PPK RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro;
- Bpk. Arif Dwiyantri, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.

Berikut paparan masing-masing narasumber:

- Ibu Christiana Sri Andayani:
 - Paguyuban Joglosemar terdiri dari 9 RS, yaitu: RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, RS Jiwa dr. Soeroyo Magelang, RSUP dr. Kariadi Semarang, RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, RS Khusus Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta.
 - Berdirinya Paguyuban Joglosemar dilatarbelakangi karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes untuk melakukan konsolidasi pengadaan.
 - Manfaat yang dirasakan setelah melakukan Konsolidasi adalah mendapatkan B/J yang value for money, mengurangi jumlah aktivitas pengadaan karena adanya penggabungan paket, meningkatkan posisi tawar pengguna (user) sebagai pembeli, mengurangi risiko pengadaan, menumbuh kembangkan industry/penyedia local.
 - Konsolidasi pengadaan dapat dilakukan antar KPA atau PPK. PPK dapat melakukan konsolidasi pengadaan dalam area kerja masing-masing.

RS

- Konsolidasi dapat dilakukan sebelum/sesudah pengumuman RUP.
 - Konsolidasi dapat menggunakan kontrak payung. Dalam proses kontrak payung tahapan yang dilalui adalah identifikasi kebutuhan, kemudian standarisasi kebutuhan dan pembelian-pelaksanaan monev.
 - Selain kontrak payung, konsolidasi pengadaan dapat berupa pengadaan Bersama, yaitu beberapa RS melakukan pengadaan untuk paket sejenis secara Bersama-sama.
 - Bentuk konsolidasi pengadaan lainnya adalah tender itemized.
 - Dalam proses konsolidasi pengadaan hal yang paling krusial adalah komitmen pimpinan dan tahapan ketika menyamakan spesifikasi teknis dan draft kontrak.
 - Kendala yang dialami ketika proses konsolidasi pengadaan adalah penyamaan spesifikasi antar user, analisa pasar yang kurang tajam, data dukung uang tidak detail dan lengkap, belum jelas penyusunan angka kredit PBJ.
 - Sampai dengan saat ini, Joglosemar sudah melakukan konsolidasi untuk pengadaan gas medis, ga LPG, kebutuhan ATK, makanan kering, dll.
 - Joglosemar pun sudah melakukan tender pra-DIPA untuk paket-paket rutin tahun depan.
 - Terlampir bahan paparan dimaksud.
- Bpk. Arif Dwiyanti
 - Latar belakang dilakukannya konsolidasi pengadaan di Pemerintah Kota Balikpapan dikarenakan adanya beberapa paket pengadaan sejenis yang dilakukan secara berulang, jumlah ketersediaan personil pokja pemilihan terbatas, waktu KPA/PPK terbatas dalam melakukan rivi.
 - Keuntungan setelah dilakukan konsolidasi yaitu menghasilkan proses tender yang lebih sedikit sehingga dapat mengurangi beban Pokja, menghemat waktu dan SDM, memberikan peluang mendapatkan penyedia yang lebih kompeten.
 - Tahapan yang dilakukan ketika konsolidasi adalah identifikasi kebutuhan, lalu pengelompokan paket (untuk paket sejenis), dan koordinasi serta kesepakatan antar pelaku pengadaan, proses pendampingan oleh Tim LKPP dan workshop untuk pelaksanaan konsolidasi.
 - Paket pengadaan yang dikonsolidasikan antara lain normalisasi saluran, penngkatan jalan, overlay jalan.
 - Terlampir bahan paparan dimaksud.

Sesi Tanya-Jawab:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana cara memberi masukan pada para pengambil kebijakan di Perguruan Tinggi untuk mau mengkonsolidasikan PBJ antar fakultas?	Perlu adanya komitmen bersama antar fakultas. Untuk mencapai komitmen tersebut bisa di share manfaat konsolidasi ke PA/KPA. Cara mudah meyakinkan PA/KPA adalah dengan menyampaikan perbedaan harga sebelum dan setelah konsolidasi yang mana

R

		harga setelah konsolidasi jauh lebih murah.
2.	Tantangan yang dihadapi pada saat pelaksanaan konsolidasi? Apa solusinya?	Adanya komitmen bersama dengan pimpinan RS untuk melakukan pengadaan secara bersih yang dituangkan dalam pakta integritas. PPK harus tidak mau diintervensi. Setiap hari jumat dilakukan hari pengadaan untuk mengevaluasi pengadaan yang sedang dilakukan. Dilakukan Rapim antar pimpinan Joglosemar secara berkala untuk membahas pengadaan.
3.	Apakah Pokir dapat dikonsolidasikan juga?	Yang namanya tender siapa pun bisa menang, termasuk untuk paket-paket Pokir. Bisa dikelompokkan terlebih dahulu paket-paket apa saja yang sejenis Pokja dituntut untuk mandiri. Bisa dikonsolidasikan kalau paket-paket sejenis.
4.	Apa konsolidasi bisa dilakukan antar PPK?	Bisa saja dilakukan konsolidasi, tergantung komitmen PPK-nya untuk sepakat melakukan konsolidasi. Tantangan terbesar untuk melaksanakan konsolidasi adalah menurunkan ego masing-masing PPK untuk menyamakan spesifikasi teknis yang akan dikonsolidasikan.
5.	Dalam pelaksanaan konsolidasi, untuk konsolidasi beberapa PPK dengan 1 penyedia, jika terjadi putus kontrak dengan PPK satunya bagaimana yang lain?	Ketika tender ada 10 aket dan yang ada pemenangnya hanya 7 penyedia, maka 3 paket lainnya dilanjutkan untuk tender ulang. Untuk wanprestasi dengan PPK yang satu tidak akan mempengaruhi PPK lainnya. lelang itemized tidak ada pembatasan nilainya. Sebelum lelang sudah dilakukan Analisa pasar dengan bertanya kepada para penyedia bahwa RS akan melakukan pengadaan untuk alkes dengan jumlah sekian, dan dalam kontrak payung dijelaskan bahwa jika terjadi wanprestasi

Handwritten signature or mark.

		dalam kontrak pembelian maka berpengaruh pada kontrak lainnya, sehingga joglosemar selalu melakukan manajemen kontrak yang ketat.
6.	Siapa yang harus mengkoordinir untuk melakukan konsolidasi? Apa posisi UKPBJ dalam konsolidasi?	Konsolidasi bisa dilakukan antar PA. Yang mengkoordinasikan konsolidasi untuk Balikpapan adalah UKPBJ. Namun demikian yang paling utama adalah komitmen Bersama untuk melaksanakan konsolidasi
7.	LKPP belum ada ketentuan/SDP kontrak payung? Konsolidasi pengadaan apakah juga konsolidasi ULP?	Pada waktu pelaksanaan konsolidasi memang belum ada ketentuan atau SDP-nya, namun kami selalu berkoordinasi dengan LKPP dan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai koridor hukumnya.

Sesi II: Transformasi Pengadaan Melalui Pemberdayaan Pelaku Usaha Lokal

Pada sesi ini yang bertindak selaku moderator adalah Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengkah Wilayah II, Bapak M. Aris Supriyanto. Untuk sesi ini menghadirkan 2 narasumber, yakni:

1. Bapak Blessmiyanda, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta;
2. Ibu Dian Lakshmi, Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut paparan masing-masing narasumber:

1. Pak Blessmiyanda

- Kebijakannya untuk meningkatkan usaha kecil melalui pengadaan pemerintah
- Pengadaan non tender tidak termonitor pelaksanaannya
- Pengadaan yang banyak tersebut nilainya dibawah 200jt yang banyak tersebar
- Tidak tepat melakukan rencana pengadaan sebelum rencana RKAUPPS belum ditetapkan
- Saat ini banyak perusahaan bendera
- Kendala pengadaan saat ini adalah data pelaku pengadaan masih administratif.
- Strategi dalam pemberdayaan usaha lokal yaitu dengan menggunakan katalog elektronik lokal, e-order, dan pengadaan melalui swakelola tipe III dan tipe IV.
- Katalog elektronik lokal dilakukan dengan adanya latar belakang konsolidasi pengadaan untuk barang dan spesifikasi yang sama nama harga beda hal ini

✍

dilakukan untuk mengurangi salah satu potensi temuan audit, upaya untuk melakukan konsolidasi pengadaan untuk barang/jasa yang dibutuhkan banyak OPD, untuk meminimalisasi kegagalan pelaksanaan kegiatan

- DKI Jakarta sekarang ini mulai meninggalkan tender karena tender dinilai sudah tidak sehat.
- Pencapaian katalog lokal DKI sudah 4857 yang tayang.
- E-order dibuat seperti bukalapak namun *free charge*. Sistem dihandle oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengadaan makan minum dapat dilakukan melalui e-order dengan maksimal pengadaan sebesar Rp.50,000,000,-.
- DKI memiliki regulasi (Pergub DKI No. 102 tahun 2018) tentang pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) untuk para UMKM dapat menginput data usaha mereka. Pemerintah yang akan hunting para calon UMKM. UMKM kesulitan mengikuti tender maka dibuat database dimana UMKM dapat mendaftar. Hal ini sudah diaplikasikan pada pengadaan jamuan rapat di seluruh OPD yang nilainya mencapai Rp. 500 Milyar/tahun. Saat ini UMKM yang sudah terdaftar sebanyak 183.
- Kendala usaha kecil adalah pembayaran, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan solusi berupa *payment gateway* dengan bekerjasama dengan Bank DKI untuk proses percepatan pembayaran (maksimal 3 hari).
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki market place yaitu e-order. OPD dapat melakukan pengadaan langsung melalui e-order dengan nilai maksimal sebesar Rp. 50,000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Swakelola yang dilakukan biasanya adalah swakelola tipe I. Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini melakukan Swakelola tipe III dan tipe IV, latar belakangnya adalah banyak pelaksanaan kegiatan yang tidak melibatkan kelompok masyarakat, banyak kegiatan yang tidak menarik penyedia sehingga OPD tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh pelaksanaan swakelola tipe IV adalah pengadaan makanan tambahan anak sekolah dimana nilai anggarannya sebesar Rp. 244 Milyar dan diperuntukkan bagi 148,958 siswa. Hal ini membuka lapangan kerja bagi 4,245 orang dimana 3,663 orang tidak bekerja sebelumnya.
- Terlampir bahan paparan dimaksud.

2. Ibu Dian Lakshmi

- Bahwa pada dasarnya pengadaan bertanggung jawab pada perubahan budaya yang terjadi dan akan terjadi.
- Sesuai dengan Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan disebutkan bahwa Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- DIY termasuk daerah yang miskin sumber daya alam namun kaya akan budaya.
- Pengadaan harus memiliki tujuan tidak hanya material tapi juga imaterial. Warisan-warisan kebendaan harus terus diproduksi agar terus berlanjut keberadaannya. Gubernur DIY tidak menginginkan bila seseorang di DIY tetap dapat menikmati alat musik yang pas dan menentramkan hati.
- Karya seni budaya sulit dimasukkan dalam sistem pengadaan yang rigid. Berbeda dengan alat musik listrik.



- Pada pengadaan gamelan ini terdapat perbedaan pada pelaku pengadaan dimana dosen ISI (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta direkrut khusus untuk mengidentifikasi kebutuhan akan gamelan yang sesuai.
- Pengadaan gamelan di Pemerintah Provinsi DIY menggunakan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Terlampir bahan paparan dimaksud.

Sesi Tanya-Jawab

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana mekanisme pembentukan harga pada e-order?	Harga diserahkan kepada pelaku usaha itu sendiri. Mekanisme pasar yang akan membentuk harga dimana harga yang mahal tidak akan laku dan harga murah yang akan dibeli oleh pengguna barang/jasa. Aplikasi e-order mirip dengan go-food jadi tergantung pada pelaku usaha dalam menjual dengan melihat jangkauan dan permodalan.
2.	Saat ini paket gamelan tidak hanya di dinas kebudayaan tapi juga ada di dinas lain. Bagaimana menyikapinya?	Sementara taun ini hanya dinas kebudayaan, akhir tahun akan dilakukan evaluasi hingga Gubernur DIY mengeluarkan pergub yang dapat mengatur tentang pengadaan gamelan. Harapannya adalah katalog lokal.
3.	Pengadaan gamelan sebanyak 2000 set. Dibutuhkan berapa pengrajin? dan bagaimana kontraknya?	Pada saat kebutuhan 2000 set disesuaikan dengan kemampuan pengrajin. Matriks yang dibuat menghitung kemampuan pengrajin dalam setahun. Gamelan berbahan perunggu dihasilkan lebih banyak di wilayah Jawa Tengah sehingga dilakukan kontrak, tanpa uang muka, dengan sistem kepercayaan. Pembuatan gamelan seperti pembuatan rempeyek yang progressnya satu persatu dan tidak dapat dilompati salah satu tahapnya.
4.	Bagaimana meyakinkan UMKM untuk mengikuti e-order?	E-order itu toko seperti dipindahkan ke dalam sistem DKI. Kata kuncinya adalah mekanisme pasar. Bagaimana validasinya yaitu

		UMKM diberikan kepastian tentang tata cara pembayaran. Makanya digandeng BPD. Bank DKI (BUMD) diminta menjadi pemberi donor bagi pelaku usaha.
--	--	--

Sesi III: Inisiatif Masyarakat Sipil Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi dan Forum Kerjasama Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tipikor Pada Penyelenggaraan Pemerintah

1. Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW)

- Latar belakang ICW melakukan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah karena masih rawan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Ada tiga sector yang rawan korupsi yakni infrastruktur, bea cukai, perizinan, namun di infrastuktur tersebut sangat rawan korupsi dari berbagai elemen;
- Berbagai macam reformasi baik dari Lembaga, peraturan yang dapat menutup celah korupsi terus kami lakukan;
- Namun yang perlu diperhatikan pengaturan barang/jasa masih berupa peraturan presiden dan kami mengharapkan pengaturan pengadaan barang/jasa bisa berupa Undang-Undang;
- Sehingga ada jarak antara pelayanan public dengan peran masyarakat, sehingga dibutuhkan peran dari masyarakat dalam mengawal pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Opentender.net merupakan bentuk analisis fraud dari pengadaan barang/jasakerjasama antara ICW, LKPP, IAPI, dimana opentender ini menggunakan mekanisme dalam mendeteksi adanya fraud yakni HPS vs Nilai Kontrak, Monopoli, Waktu, Nilai Kontrak, Jumlah peserta dan Pemenang Berulang
- Opentender.net kita lakukan untuk melakukan investigasi hingga pelatihan hingga kajian akademik di universitas dan diharapkan opentender.net ini bisa dipelajari oleh semua pihak baik regional maupun global;
- Opentender.net terus dilakukan upaya peningkatan berupa membangun versi terbaru, memperkuat indicator indikasi fraud, cakupan monitoring, dipelajari secara luas oleh masyarakat global;
- Opentender.net memiliki peluang kolaborasi yakni menyepakati agenda advokasi di sector PBJ, membangun rencana dan pelaksanaan PBJ secara tepat;

2. Hendri Santosa (inspektorat Jawa Tengah)

- Forum dasar kerjasama proses aduan yang ada di pemprov jawa tengah antara APIP, Polda dan Kejaksaan, forum kerjasama proses aduan ini didasarkan oleh UU Pemda, UU Kejaksaan, UU Kepolisian;
- Dalam kerjasama ini saling pilah milah dalam proses aduan, dimana aduan tersebut itu harus difilter sesuai tupoksinya masing-masing instansi;
- Di forum proses aduan juga ada kerjasama terkait Pendidikan antarinstansi supaya masing-masing instansi bisa tahu permasalahan mana yang harus diselesaikan dan dilimpahkan ke instansi yang berwenang;

VP

- Laporkorupsijateng.id merupakan portal untuk memberantas korupsi di pemerintahan provinsi jawa tengah;
- Kedepannya aduan masyarakat akan melibatkan semua inspektorat, kejaksaan, polisi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di jawa tengah sehingga tidak ada tumpeng tindih terhadap penanganan suatu kasus;
- Laporkorupsijateng.id merupakan bentuk kerjasama antara Kasubdit III/Tipikor Ditkrimsus Polda Jateng, Koordinator Pidsus Kejati, inspektorat jawa tengah

Sesi Tanya-Jawab

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Dalam bentuk apa petunjuk teknis tindak lanjut PKH kepala daerah, polda dan kejaksaan yang bapak buat	<p>Pedoman kerja yakni merinci, pakai website laporkorupsijateng.id tadi, dimana masyarakat mengadakan ke web tersebut, nanti dari konsultasi yang masuk nanti akan kami filter berdasarkan tupoksi instansi terkait</p> <p>Kerjasama antara mendagri, polri dan kejaksaan RI dilakukan untuk upaya melakukan tindak pidana korupsi, Namun indicator keberhasilan aparat penegak hokum dalam menangani korupsi ialah tingkat pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi dan ini merupakan dilemma dimana tingkat tinggi rendahnya korupsi merupakan hal yang terbalik dengan pelayanan pemerintah</p>
	Apa kriteria kesalahan PBJ masuk pidana atau perdata?	Issue ini selalu muncul antara UU Tipikor (kerugian negara) dan Kontrak yakni 1320 KUHPerdata, Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya ialah hokum perdata, namun bisa masuk keranah hokum pidana jikalau individu tersebut melakukan pelanggaran UU tipikor,
	APIP itu mandul apapun regulasi yang ditetapkan karena ada dalam manajemen, TP4D hanya membuat oknum APH menjadi aduan PBJ dalam pemerintah menjadi proyek	<p>Apip itu tergantung leader, dimana apip membantu pimpinan, Apabila pimpinan tersebut menerapkan peraturan dengan baik,</p> <p>Namun Inspektorat sekarang ranahnya ke pencegahan, konsultasi</p>

42

Demikian notulensi rapat ini disampaikan dengan sebenar-benarnya.

Notulis,



Dian A Wardhani



Niken Novia S



Yogie

NOTULENSI

No.			
1	Tempat Pelaksanaan	:	Plenary Hall, JCC
2	Hari/ Tanggal	:	Kamis, 7 November 2019
3	Waktu Pelaksanaan	:	Pukul 08.00 s.d. selesai
4	Agenda	:	Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa
5.	Peserta	:	Terlampir

Kelas III SDM dan Kelembagaan

A. Sesi Diskusi I : Evaluasi Kritis Profesionalisasi SDM dan Kelembagaan B/J

I. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, Bapak Tatang Rustandar Wiraatmadja : Evaluasi Kritis Modernisasi Kelembagaan dan Profesionalisasi SDM Pengadaan Barang/Jasa

- Capaian pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah:
 - a. Sebanyak 75 K/L sudah membentuk baik berbentuk UKPBJ maupun ULP, dengan UKPBJ struktural dan permanen sebanyak 34 (45,3%) dan yang masih berbentuk ULP sebanyak 41 (54,7%).
 - b. Pemerintah Daerah karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2019, dari 542 UKPBJ sebanyak 98% sudah terbentuk, dengan UKPBJ permanen sebanyak 83.6% dan yang masih *adhoc* sebanyak 16.4%.
 - c. Secara total sebanyak 617 (98.2%) UKPBJ sudah terbentuk.
- Evaluasi kritis mengenai Pembentukan UKPBJ struktural:
 - a. Belum adanya regulasi pembentukan UKPBJ struktural di K/L
 - b. K/L/Pemda belum mendapatkan informasi yang memadai tentang amanat pembentukan UKPBJ struktural
 - c. Pimpinan K/L/Pemda tidak memiliki komitmen dalam melaksanakan amanat pembentukan UKPBJ struktural
- Berdasarkan data Pengisian Penilaian Mandiri dan Pengisian Peta Jalan Tingkat Kematangan UKPBJ, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 UKPBJ yang sudah memenuhi 9/9 tingkat kematangan (CoE), yaitu Provinsi Bali, Kabupaten Badung, dan Provinsi Sulawesi Utara.
- Evaluasi terhadap pencapaian tingkat kematangan: K/L/Pemda belum merasa perlu melaksanakan penilaian dan peningkatan kematangan UKPBJ, UKPBJ belum memahami tugas fungsi UKPBJ mencakup pengelolaan kelembagaan berupa pengukuran tingkat kematangan, UKPBJ belum mempunyai tim pengelolaan kelembagaan yang melaksanakan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ dengan ketua tim adalah Sekretaris Daerah/Asisten.
- Terkait pembentukan UKPBJ di K/L perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dalam menyusun regulasi pembentukan UKPBJ struktural di K/L. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan KPK dalam mendorong pembentukan UKPBJ struktural dan pencapaian tingkat kematangan UKPBJ level proaktif (sudah dituangkan dalam Aksi Stranas PK).

- Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) secara nasional sebanyak 7500 orang yang terdiri dari 2.000 orang di Pemerintah Pusat dan 5.500 pada Pemerintah Daerah. Sedangkan saat ini ada 1.998 orang JF PPBJ pada tahun 2019, yang terdiri dari 1.495 JF PPBJ yang masih aktif dan selebihnya ada yang pembebasan sementara, pensiun dan meninggal dunia.
- Langkah Pemenuhan JF PPBJ:
 1. Instansi yang bersangkutan menghitung kebutuhan JF PPBJ dengan menghitung ABK menggunakan acuan Peraturan LKPP 14/2013.
 2. Instansi menyampaikan hasil perhitungan kebutuhan JF PPBJ untuk divalidasi LKPP
 3. Instansi menyampaikan Permohonan Penetapan Kebutuhan JF PPBJ ke Kementerian PANRB
 4. Instansi mengoptimalkan periode Penyesuaian/Inpassing dan Formasi CPNS
 5. Instansi mengangkat dan menempatkan JF PPBJ di UKPBJ dengan status Penuh Waktu
- Jumlah K/L/Pemda yang sudah ada JF PPBJ sebanyak 135 yang terdiri dari 33 K/L dan 102 Pemda.
- Jumlah JF PPBJ yang sudah diusulkan melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing sebanyak 984 orang yang tersebar di K/L. Sedangkan total sebanyak 1.174 JF PPBJ yang usulkan di Pemda.
- Melalui mekanisme CPNS terdapat 160 orang dengan formasi CPNS JF PPBJ Tahun 2018 dengan jumlah instansinya 18 yang terdiri dari 2 orang di Kabupaten Bone dan 17 instansi K/L.
- K/L yang belum menghitung kebutuhan dan mengusulkan inpassing ada 27 K/L. sedangkan Pemda sebanyak 395 instansi.
- Evaluasi kritis terhadap pencapaian pembentukan JF PPBJ:
 1. Instansi belum menghitung kebutuhan JF PPBJ (Perka LKPP 14/3013)
 2. Instansi belum mengajukan validasi atas hasil perhitungan kebutuhan JF PPBJ
 3. Instansi belum menyampaikan Permohonan Penetapan Kebutuhan JF PPBJ ke KemenPAN-RB
 4. Instansi belum menginput ke dalam e-formasi KemenPAN-RB
 5. Instansi belum optimal memanfaatkan periode Penyesuaian/Inpassing
 6. Instansi belum mengusulkan formasi CPNS JF PPBJ
- Jumlah PNS sangat terbatas, sehingga peluang CPNS dapat dimanfaatkan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan, selain itu adanya rencana penghapusan jabatan struktural eselon 3 kebawah, peningkatan profesionalitas ASN, perbaikan remunerasi melalui kelas jabatan juga menjadi peluang pembentukan JF PPBJ.
- Sebanyak 13 K/L memiliki Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) JF PPBJ, sedangkan Pemda ada pada masing-masing Provinsi.
- Evaluasi pada pembinaan JF PPBJ:
 1. terdapat JF PPBJ yang tidak ditugaskan di bagian PBJ (tidak sesuai dengan tujuan dengan konsekuensi karir terhambat karena kekurangan angka kredit)

2. SK Pengangkatan JF PPBJ tidak ditembuskan ke LKPP dan BKN (angka kreditnya tidak terkumpul)
 3. JF PPBJ belum menyusun DUPAK (dari 1900 ada 200 lebih yang belum mengikuti diklat pembentukan, jadi belum mengetahui cara menyusun DUPAK)
 4. Instansi belum membentuk TPAK
 5. Belum mendapat tunjangan jabatan fungsional PPBJ
 6. Belum menyusun TPP
- Langkah pembinaan SDM: menugaskan JF PPBJ pada fungsinya (bagian PBJ, JF dapat membantu PA/KPA dalam menyusun perencanaan atau sebagai anggota TAPD), mendorong menyusun DUPAK dan membentuk TPAK, memfasilitasi Forkom JF PPBJ di internal dengan melibatkan stakeholder, mengalokasikan anggaran dan memfasilitas pelaksanaan Diklat serta Ujikom, mengalokasikan anggaran untuk Tunjangan/Tambahan Penghasilan Lainnya, menembuskan SK Pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan, dan Menyusun kebijakan yang mengapresiasi dan mendukung keberadaan JF PPBJ
 - Instansi terkait yang perlu bersinergi dalam pengembangan dan pembinaan JF PPBJ, yaitu LKPP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan BKN.
 - Rencana 5 tahun kedepan:
 1. Revisi Permenpan RB 77/2012 dengan menyusun Peraturan LKPP
 2. Melanjutkan pengembangan sistem penghitungan dan penilaian AK JF PPBJ secara online
 3. Menyusun Peraturan & Kebijakan SDM PBJ Non JF PPBJ (Pembinaan SDM PBJ Non JF PPBJ)
 4. Mengoptimalkan penggunaan SI dalam Pengelolaan Data SDM PBJ dan Pengambilan Keputusan
 - JF PPBJ bukan hanya keahlian tapi juga ketrampilan. Sehingga lulusan D3 bisa menjadi JF PPBJ.

II. Direktur Sertifikasi Profesi, Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsih : Evaluasi Kritis Sertifikasi PBJ

- Sertifikasi merupakan proses pemberian pengakuan. Perlu menunjukkan di bidang PBJ memiliki pengakuan melalui sertifikat kompetensi.
- Memahami regulasi terkait PBJ, belum tentu paham pelaksanaannya. Pemahaman terkait regulasi PBJ merupakan bagian dari sertifikasi tingkat dasar, sedangkan yang dimaksud dalam Perpres 16/2018 adalah sertifikasi kompetensi PBJ.
- proses sertifikasi kompetensi → menunjukkan pengalaman pekerjaan dalam bidang PBJ (asesmen kompetensi dengan wawancara, telekonferens). Asesor yang berkompentensi dengan menunjukkan memiliki sertifikat PBJ dan sertifikat asesor.
- Manfaat sertifikat kompetensi :
 1. eksistensi personal dalam bidang PBJ diakui dengan kepemilikan sertifikat kompetensi. Eksistensi ini melekat pada personal bukan jabatan.

2. menunjukkan kredibilitas, artinya harus mengikuti kode etik yang terkait.
 3. pengembangan karir yang memanfaatkan sertifikat tk. Dasar dan sertifikat kompetensi. Sertifikat tk. Dasar bisa digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja.
 4. peningkatan keterampilan
 5. pengembangan diri dengan menambah kepercayaan diri dalam melaksanakan di bidang di sertifikat masing-masing
 6. pengakuan keahlian dengan adanya pengakuan dari instansi yang mengeluarkan sertifikat (LKPP dibidang PBJ dengan prosedur nasional yang diatur oleh BNSP, maka sertifikatnya diakui secara nasional)
 7. merupakan *long lifetime investment*
- Kompetensi harus diikuti dengan lingkungan yang berubah, sehingga perlu memelihara keberlangsungan
 - Sertifikat kompetensi pertama kali muncul pada tahun 2015. Sampai dengan saat ini sudah ada sebanyak 523 pemilik sertifikat kompetensi PBJ yang tersebar dalam 29 provinsi, maka dari itu ada 5 provinsi yang belum memiliki, yaitu Kalimantan Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Riau, dan NTT.
 - Pemilik sertifikat memenuhi 5 skema sertifikasi, yaitu PPBJ Muda, PPBJ Madya, dan Okupasi (PPK PBJ, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan).
 - Angka 523 merupakan 54% dari seluruh yang mengikuti sertifikasi kompetensi (sekitar 1000 orang).
 - Dari 523 pemilik sertifikat terdiri dari 302 PPBJ Muda dan 123 JF PPBJ Madya dari 1495 JF PPBJ, 38 PPK dari 64.277 PPK yang sudah bertransaksi melalui SPSE, 193 Pokja Pemilihan dari 288.125 yang sudah melakukan transaksi, serta 51 Pejabat Pengadaan.
 - Langkah untuk meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat kompetensi → TUK (Tempat Uji Kompetensi) mandiri terbentuk di Provinsi. Saat ini sudah ada 9 TUK, yaitu LKPP, BPSDM Provinsi Bali, DIY, Bengkulu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB serta Calon TUK di Banten dan Maluku.
 - Rencana 5 tahun mendatang → menciptakan *demand* sertifikasi dengan mengidentifikasi skema yang dibutuhkan diluar yang sudah ada, memanfaatkan SI berbasis IT untuk melakukan sertifikasi kompetensi (pendekatan *Massive, Online, Open* untuk Sertifikasi Tk. Dasar di tahun 2023 dan berbasis IT dengan telekonferens untuk sertifikasi kompetensi, dan melakukan integrasi data), dan melakukan kerjasama dengan BPSDM dan Universitas untuk membentuk TUK.
 - Kapasitas SDM untuk 5 tahun kedepan naik 20% per tahun : 2020 (2710), 2021 (3060), 2022 (3952), 2023 (4150), dan 2024 (4740). Untuk mencapai target tersebut, perlu adanya dukungan dan kolaborasi LKPP dengan instansi, peserta sertifikasi. Sehingga memerlukan dukungan internal yang terdiri dari alokasi anggaran, komitmen pimpinan, perluasan penugasan pada 4 kompetensi (terutama JF PPBJ), dan kesempatan pelatihan/bimtek.
 - Informasi mengenai jadwal, langkah pendaftaran, standar kompetensi yang diperlukan dapat dibuka pada laman ppsdm.lkpp.go.id

- *if you think you can do something its confidence, but if you can do it its competent.*

III. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Ibu Suharti : Evaluasi Kritis Dalam Penyelenggaraan Pelatihan PBJ

- Dalam pengembangan dan pembinaan SDM saat ini memanfaatkan teknologi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Terdapat 89 LPP terakreditasi dengan 650 penyelenggaraan pelatihan per tahun.
- Transformasi metode pembelajaran yang telah dan akan diterapkan di Pusdiklat adalah dimulai dari tatap muka (sebelumnya) → *blended learning* (saat ini) → *blended learning + Massive Online Open Course (MOOC) + OJT* (harapan di masa depan)
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelatihan pada tahap perencanaan dan persiapan memanfaatkan apikasi e-learning dan webinar, pada saat pelaksanaan memanfaatkan portal PPSDM, dan pada saat evaluasi memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Pelatihan.
- Terdapat 9 program pelatihan Teknis dan 55 program pelatihan kompetensi yang telah disusun oleh Pusdiklat LKPP.
- Terkait biaya pelatihan gratis, namun untuk akomodasi peserta ditanggung masing-masing pribadi/instansi.
- Perlu adanya dukungan dari LPP untuk mentransfer inovasi Pusdiklat mengenai program-program pelatihan.
- Terdapat 31 LPPBJ terakreditasi A dan 42 LPPBJ terakreditasi B, terdiri dari 8 BPSDM, 16 K/L, 6 Swasta, dan 1 Universitas. Diharapkan di setiap provinsi mempunyai LPPBJ yang terakreditasi A.
- Kedepannya akan ada pelatihan untuk penyedia.
- Terdapat 425 fasilitator untuk PBJ tingkat dasar, sedangkan untuk fasilitator PBJ Kompetensi sebanyak 61 orang.
- Hambatan dan tantangan 2018-2019:
 1. Perubahan metode pembelajaran klasikal menjadi *blended learning*;
 2. Belum semua program pelatihan yang disusun terlaksana pelatihannya;
 3. Kinerja LPPBJ dan Fasilitator belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan;
 4. Tidak meratanya sebaran LPPBJ dan kurangnya jumlah Fasilitator PBJ Kompetensi.
- Rencana 5 tahun kedepan:

Tahun	Rencana
2020	1. Penyusunan 5 Program Pelatihan (Profesiensi PBJP Dasar, Katalog Penyedia, Penjenjangan JFPPBJ) 2. LPPBJ di 14 Prov terakreditasi A 3. 15% Fasilitator IKP ≥ 3,50 4. Pelatihan Teknis: 12 5. Pelatihan Kompetensi: 14
2021	1. Penyusunan 5 Program Pelatihan (SPP, Fasilitator Katalog Penyedia, Fasilitator Penjenjangan JFPPBJ) 2. LPPBJ di 18 Prov terakreditasi A

	3. 20% Fasilitator IKP $\geq 3,50$ 4. Pelatihan Teknis: 13 5. Pelatihan Kompetensi: 15
2022	1. Penyusunan 7 Program Pelatihan (<i>Defence Procurement</i> , PBJ di Desa, Fasilitator KPBU Dasar, Pelatihan SPSE, POKJA, PP, PPK) 2. LPPBJ di 24 Prov terakreditasi A 3. 30% Fasilitator IKP $\geq 3,50$ 4. Pelatihan Teknis: 14 5. Pelatihan Kompetensi: 16
2023	1. Penyusunan 7 Program Pelatihan (Saksi Ahli, KPBU Lanj. A&B, SCM, Pengawasan Internal, Sengketa & Permasalahan Hukum Kontrak Manajemen Resiko Pekerjaan Konstruksi) 2. LPPBJ di 28 Prov terakreditasi A 3. 40% Fasilitator IKP $\geq 3,50$ 4. Pelatihan Teknis: 15 5. Pelatihan Kompetensi: 17
2024	1. Penyusunan 7 Program Pelatihan (Fasilitator KPBU Lanj. A&B, Fasilitator SCM, Fasilitator Pengawasan Internal dalam PBJ, Fasilitator Sengketa dan Permasalahan Hukum Kontrak, Fasilitator Manajemen Resiko pada Pekerjaan Konstruksi) 2. LPPBJ di 30 Prov terakreditasi A 3. 50% Fasilitator IKP $\geq 3,50$ 4. Pelatihan Teknis: 16 5. Pelatihan Kompetensi: 18

- Strategi untuk mencapai target 5 tahun kedepan:

1. Meningkatkan Program Pelatihan PBJ berbasis blended learning, on Job Training (OJT) dan MOOC;
2. Meningkatkan sebaran LPPBJ terakreditasi A disetiap provinsi terutama oleh BPSDM;
3. Menambah jumlah dan sebaran Fasilitator PBJ Kompetensi;
4. Pengembangan Knowledge Management System (KMS).

IV. Sesi diskusi

1. Masih ada kab/kota terkendala personil yang masih adhoc dan ULP yang belum bergabung dengan LPSE. Mohon sharing kiat Provinsi agar dapat membantu kab/kotanya tersebut.

Jawab:

- Sesuai amanat Perpres 16/2018, personil UKPBJ dapat belum dijabat oleh JF PPBJ hingga 2023, namun tidak boleh adhoc. Selain itu, tidak boleh dijabat oleh pegawai OPD, melainkan personil UKPBJ (dalam Perpres 16/2018 tidak ada masa transisi, dan berlaku sejak Perpres berlaku).
- Pada model tingkat kematangan UKPBJ, bukti dukung/penilaian/syarat memenuhi level proaktif, LPSE harus bergabung dengan UKPBJ. Selain itu di tahun 2020 terdapat 100 UKPBJ harus mencapai level proaktif yang ditandai dengan penggabungan LPSE dengan UKPBJ.

2. Terkait isu adanya pemangkasan Jabatan Esselon III dan IV, kebanyakan UKPBJ dijabat setingkat eselon tersebut.

Jawab:

Sedang didiskusikan dengan Kementerian PANRB terkait hal ini.

Sebaiknya bukan strukturnya melainkan fungsinya yang diprioritaskan di UKPBJ. UKPBJ merupakan nomenklatur generik, walaupun dihilangkan diharapkan fungsinya akan naik ke eselon di atasnya.

3. Terkait pasal 11 Peraturan LKPP tentang UKPBJ terkait Pokja Pemilihan, apakah benar bilamana Pokja Pemilihan masih adhoc maka hasil tender bisa dianggap tidak sah?

Jawab:

Benar tidak sah karena merupakan amanat Perpres 16/2018. Terkait sanksi yang dapat ditimbulkan tidak ada, hanya masalah legitimasi.

4. Diharapkan LKPP dapat merekomendasikan kembali perubahan Perpres Nomor 109 tahun 2016 terkait tunjangan JF PPBJ karena di beberapa daerah Pokja Pemilihan tidak mendapatkan Insentifnya.

Jawab:

- Tunjangan Jabatan itu sifatnya melekat.
- Lebih baik menjalankan Peraturan yang berlaku terlebih dahulu, jika ada Pemda yang tidak menjalankan silahkan laporkan. Mungkin lebih kepada meninjau kembali peraturan tersebut.

5. Apakah kepala UKPBJ boleh merangkap sebagai PPK?

Jawab:

Boleh dirangkap, namun sebaiknya diganti oleh staf administratif lain untuk menghindari *conflict of interest*.

6. Apakah benar ASN yang ingin menjadi JF PPBJ harus berstatus sebagai staf UKPBJ? Bagaimana jika ada staf dari OPD di luar UKPBJ ingin menjadi JF PPBJ? Kedudukan SDM PBJ ada di UKPBJ?

Jawab:

Diperbolehkan untuk berada di OPD untuk Pejabat Pengadaan yang harus dijabat oleh JF PPBJ. Penghitungan ABK PP di OPD tersebut juga termasuk pada penghitungan ABK UKPBJ. Jika hasilnya dibawah 1, maka dikumpulkan dan jumlahkan, maka JF PPBJ ini diangkat di UKPBJ. Apabila OPD perlu penunjukan langsung, dapat melalui mekanisme "pinjam" JF PPBJ di UKPBJ. Yang boleh diangkat di OPD adalah jika angka hasil ABKnya minimal 1 sehingga ada pengembangan karir.

7. Terkait tunjangan untuk personil JF PPBJ, bagaimana menyikapinya karena di daerah banyak orang yang enggan menjadi pengelola PBJ (Pokja Pemilihan) apalagi untuk setingkat JF PPBJ

Jawab:

Dapat diberikan insentif yang memadai. Terkait insentif di Pemda diatur dalam PP 12/2019 dan PMDN 11/2011 dimana kepala daerah mempunyai kewenangan memberikan tambahan penghasilan PNS dengan pertimbangan objektif dan persetujuan DPR

8. Mengapa bentuk UKPBJ tidak diseragamkan menjadi UKPBJ yang mandiri permanen dalam bentuk kantor atau badan (bukan melekat di Setda), karena terlalu panjang birokrasinya

Jawab:

Dalam PMDN 112/2018 diamanatkan bahwa UKPBJ berada di bawah Setda. Sebaiknya laksanakan dan setelah 2 tahun akan dievaluasi mengenai struktur UKPBJ di bawah Setda.

9. Hasil tender Pokja Pemilihan yang bertanggung jawab adalah seluruh anggota Pokja Pemilihan bukan kepala UKPBJ.
10. Adanya kewajiban PPK, Pokja, PP bersertifikat kompetensi sebelum tahun 2024. Jika belum berkompeten dan bersertifikat, hasil pengadaannya belum sah. Di Perpres 16/2018 juga tidak disebutkan mengenai sanksi. Jika pada tahun 2024 belum tersertifikat, maka proses pengadaan akan dilaksanakan oleh Agen Pengadaan.

11. Apakah biaya uji kompetensi PPK, PP, Pokja Pemilihan ditanggung LKPP?

Jawab:

- Bisa, namun tergantung pada anggaran yang telah ditentukan terkait kemampuan jumlah penyelenggaraan uji kompetensi. Sedang ingin mengurangi ujian dalam bentuk tatap muka.
- Yang tidak bisa ditanggung adalah akomodasi SPPD untuk mengikuti ujikom LKPP.

12. Jadwal dan proses uji kompetensi serta jadwal pelatihan untuk JF PPBJ dapat dibuka pada laman ppsdm.lkpp.go.id atau scan barcode yang ada.

13. Apakah JF PPBJ harus memiliki sertifikat Pokja, PP?

Jawab:

JF PPBJ sudah ada skema tersendiri, jika ingin naik jenjang maka perlu mengikuti uji kompetensi dengan skema tersebut, tidak perlu ikut uji kompetensi okupasi.

14. Mohon programkan untuk pengelola LPSE

Jawab:

Sudah ada di LKPP, hanya perlu membuat program pelatihan LPSE di Pusdiklat PBJ karena saat ini masih di Direktorat teknisnya.

15. Pemahaman ahli pratama (III/a - III/b), muda (III/c - III/d), dan madya (IV/a - IV/c). Saat ini sedang akan dibuka untuk JF PPBJ ketrampilan (mahir, penyelia dsb).

16. Pelatihan dibuat sesuai dengan standar kompetensi yang belaku, hanya format yang yang berubah, secara substansi tidak terlalu banyak berubah.

17. Terkait dengan server yang terkadang *down*, perlu adanya diskresi yang dilakukan.

18. PPK hanya dijabat JF pengelola keuangan?

Jawab:

PPK bukan jabatan, melainkan merupakan penugasan, jadi bisa siapa saja. JF pengelola keuangan bisa langsung menjadi PPK, JF PPBJ harus ditambah kompetensi pengelolaan keuangan, JFT harus ditambah kompetensi pengelola keuangan dan PBJ.

19. Terkait dengan PPK dosen di Universitas, biasanya perguruan tinggi merupakan BLU. BLU tidak terikat dengan Perpres, artinya bisa diatur oleh peraturan pimpinan. Pada perguruan tinggi boleh membentuk UKPBJ sendiri. Jika mengikuti Perpres 16/2018, maka Pokja Pemilihan tidak boleh tersebar, melainkan harus di UKPBJ.

B. Sesi Diskusi II

I. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Harno Tri Madi : *Sharing Session* terkait Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perhubungan

- Kementerian Perhubungan merupakan salah satu kementerian yang mempunyai satuan kerja yang banyak di seluruh Indonesia sekitar 583 satker, dengan 851 PPK, dan 2.949 paket pengadaan.
- Sebelum Tahun 2018 terdapat 113 ULP di satker yang masih tersebar menjadi beberapa bagian → Pada bulan Januari 2018 dibentuk Biro LPPBMN dengan 1 ULP yang sudah permanen, namun 112 ULP lainnya masih bersifat *ad hoc* dan tersebar → Pada Juli 2018 atau saat Perpres 16/2018 dan Peraturan LKPP terbit, ULP di satker bubar dan semua paket mengumpul di Jakarta. Saat itu sudah terbentuk 1 UKPBJ permanen dengan 7 Pokja Pemilihan yang berada di Kantor Pusat → Pada Januari 2019, Kepala Biro LPPBMN sebagai Kepala UKPBJ dapat membentuk satuan pelaksana (Satlak) di daerah, sehingga dengan 1 UKPBJ yang permanen terdapat 14 Pokja Pemilihan di Kantor Pusat dan 26 Pokja di 7 Satuan Pelaksana.
- Per Januari 2019, Pokja Pemilihan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Satker dibuka dengan pendekatan pusat kegiatan, pokja dibentuk dengan pendekatan budaya (asal daerah).
- Sebagian pokja berada di kantor-kantor otoritas bandar udara.
- Pekerjaan dengan nilai kurang dari 10 M boleh dilakukan oleh pokja manapun, namun jika pekerjaan dengan nilai lebih dari 10 M harus di Kantor Pusat (Jakarta), tapi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh pokja yang tersebar.
- Keuntungan UKPBJ jadi satu secara permanen → adanya integrasi waktu pelaksanaan tender/seleksi antar subsektor, mengetahui prioritas dan waktu pemanfaatan, keseragaman SOP, waktu pendampingan SDM menjadi lebih banyak dan optimal, serta adanya pendampingan kepada PPK dan Pokja.
- Pendekatan yang dilakukan adalah membenahi kelembagaan kemudian SDM.
- Saat Satlak terbentuk, ada pemindahan pegawai terbaik dari bagian darat, udara, air untuk menjadi staf di Biro LPPBMN. Total SDM dalam Biro LPPBMN sebanyak 210 orang dengan 151 orang dibawah 40 tahun, sedangkan 59 orang diatas 40 tahun. Namun dari 210 orang SDM hanya 3 yang JF PPBJ.
- Usaha yang dilakukan oleh UKPBJ Kemenhub:
 1. Peningkatan kemampuan Pokja Pemilihan dengan memberikan bimtek kepada seluruh Pokja
 2. Peningkatan kemampuan KPA/PPK dengan bimtek
 3. Keterbukaan informasi PBJ dengan sosialisasi pelaksanaan tender kepada asosiasi penyedia/calon penyedia.
 4. Pembahasan Rencana Kerja Anggaran
 5. Mengembangkan *e-catalog* sektoral
 6. Melaksanakan konsolidasi
- Yang dibutuhkan dalam membenahi kelembagaan dan SDM → komitmen pimpinan, penyediaan sumber daya manusia, peningkatan SDM, penghargaan, dan pola karir dan mutasi.

- Ada sistem pemberian *reward* dan *punishment* bagi anggota yang merupakan kewenangan Kepala Biro.

II. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali, I Ketut Adiarsa : Pembentukan UKPBJ Struktural dan Pembentukan JF PPBJ

- Tantangan dan permasalahan:
 1. Nilai dan jumlah paket belanja pengadaan semakin bertambah sejalan dengan peningkatan APBD tiap tahun
 2. Keberhasilan pencapaian Visi, Misi Pemda sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan pengadaan
 3. Rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pelaksanaan pengadaan
 4. Tantangan dalam menjaga integritas, prinsip dan etika pengadaan
 5. Upaya membangun profesionalisme SDM pengadaan, karena minimnya minat ASN menjadi pengelola pengadaan
 6. Pentingnya sinkronisasi kebijakan pengadaan dengan program kerja, penganggaran, pembayaran sampai dengan pengelolaan aset
 7. Banyaknya intervensi tekanan/tuntutan dari berbagai pihak
- Sebanyak 30.9% belanja PBJ harus diudkung oleh SDM yang professional dan kelembagaan yang permanen struktural.
- Pengembangan kelembagaan untuk menjadi UKPBJ yang *coe* → kelembagaan permanen struktural, dukungan penganggaran, perluasan peran, SDM.

1. Perkembangan Kelembagaan :

2009 - 2016	2017	Per 6 Februari 2019
ULP masih bersifat <i>adhoc</i> dengan personil yang masih tersebar pada tahun 2009. Pada tahun 2010, personil yang ditugaskan di ULP baik pokja maupun staf sekretariat sudah bertugas penuh waktu dan secara kepegawaian melekat dibawah Biro Aset Setda Provinsi Bali	UKPBJ sudah permanen menjadi Biro Adminisrasi PBJ dengan personil yang penuh waktu, namun LPSE masih berpisah.	Uraian tugas sudah sesuai dengan Permendagri 112/2018 dan Peraturan LKPP 14/2018 dan menggabungkan fungsi LPSE

2. Dukungan Anggaran → Anggaran untuk 5 tahun sudah masuk untuk program PBJ. Kebijakan penganggaran kendaraan dinas untuk kebutuhan perangkat daerah dan belanja modal karena adanya inefektivitas pengadaan kendaraan dinas, dan guna mengurangi biaya pemeliharaan.
3. Perluasan peran → Pembinaan pada pelaku PBJ dan pengembangan sistem dan informasi PBJ
4. SDM Biro
 - Jumlah SDM struktural sebanyak 13 orang dengan 7 Pokja yang terdiri dari 21 orang.
 - Kasubag TU ada di LPSE. Formasi JF PPBJ 31 orang, *inpassing* 8 orang lulus, 2 orang belum lulus.
 - Membangun integritas UKPBJ dengan penandatanganan pakta integritas untuk seluruh anggota UKPBJ dan melakukan SNI ISO 37001:2016
- Tingkat kematangan UKPBJ sudah mencapai 9/9 (proaktif).
- Hasil pembelajaran peningkatan kematangan kelembagaan:

1. Bentuk kelembagaan (struktural dan permanen) menjadi center point dalam implementasi kematangan Kelembagaan UKPBJ pada Pemerintah Provinsi Bali dan pemenuhan 17 standar LPSE dapat mencapai Level 3
2. Kinerja Pengadaan Barang/Jasa berorientasi kepada Hasil (Outcome) menunjang pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Daerah
3. Penempatan Sumber Daya Manusia (Pokja pemilihan dan Personil UKPBJ) pada Biro Pengadaan Barang/Jasa penuh waktu dan pemberian insentif sesuai beban kerja dan risiko.
4. Adanya dukungan dan komitmen Pimpinan Tertinggi di daerah (Gubernur dan Sekretaris Daerah) mengawal secara langsung untuk memastikan program modernisasi pengadaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5. Dukungan dana dan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro PBJ agar berjalan secara optimal
6. Adanya motivasi yang tinggi dari Pimpinan dan Staf UKPBJ/Biro PBJ untuk selalu belajar dan mengimplemetasikan domain dan variable kematangan kelembagaan.
7. Menjamin kepastian karier jafung PPBJ dan pemberian insentif sesuai dengan resiko dan beban tugas

III. Widyaiswara ahli Madya BPSDM Provinsi Bali, I Made Sedana Yoga: Pengembangan SDM Provinsi Bali

- sudah ada kolaborasi pembinaan SDM khususnya JF PPBJ dengan Biro PBJ.
- Misi :
 1. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan;
 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan program kediklatan;
 3. Meningkatkan mutu sumber daya dan profesionalisme tenaga kediklatan;
 4. Menyelenggarakan pengembangan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan.
- Motto BPSDM: tiada perubahan tanpa diklat. Setelah diklat teknis, dilaksanakan evaluasi berbasis kompetensi.
- Kebijakan diklat satu pintu → pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM terstandar dengan melibatkan komite penjamin mutu dalam perencanaan, pengelola, WI, dan peserta dalam penyelenggaraan, serta bagian komite pengawas (orang-orang independen) untuk bagian pengawasan. Diharapkan datanya terintegrasi untuk membina SDM khususnya JF PPBJ.
- Jumlah PNS Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali sekitar 55.856 orang di Kab/Kota, 11.491 orang untuk Prov. Bali, 1.183 orang struktural, 6.869 orang fungsional, dan 4.254 orang staf.
- Hanya 2 kab/kota yang memiliki JF PPBJ, yaitu Badung dan Gianyar.
- Jenis diklat yang dilakukan salah satunya adalah diklat teknis PBJ. Selain itu ada pelatihan dasar calon PNS, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis lain, pelatihan fungsional.
- Sudah merupakan LPP akreditasi A yang dapat menjadi dasar membentuk TUK Mandiri.
- Terobosan inovasi : Materi PBJP menjadi materi muatan lokal di 74 kelas/angkatan pelatihan dasar CPNS Golongan III. Harapannya dapat memberikan pilihan JF PPBJ.
- Gagasan kreatif : usulan sertifikat ahli PBJ sebagai salah satu porsi/bobot penilaian persyaratan seleksi jabatan administrasi (Pengawas dan Administrator)

- Sedang menyusun draft Pergub Bali tentang pendidikan dan pelatihan sebagai peningkatan kapasitas SDM PBJ.

IV. Biro Umum LIPI, Imam Syaifullah: Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan di LIPI

- Peta jabatan di LIPI dibagi menjadi 3 jabatan : JPT/Adm/pengawas, SDM Iptek, dan SDM Pendukung.
- JF PPBJ masuk dalam SDM Pendukung, yaitu JF Keahlian. Sebanyak 18 orang JF PPBJ : 9 orang Pertama, 8 orang Muda, dan 1 orang Madya.
- Langkah optimasi : Reorganisasi dengan acuan Perpres 45/2015, Perka LIPI 1/2019. Reorganisasi dilakukan guna redistribusi pegawai dan mengurangi jabatan struktural.
- Struktur organisasi UKPBJ berada di bawah Biro Umum (eselon IV). Sedang diproses untuk menjadi eselon III.
- Esensi reorganisasi:
 1. Penyederhanaan struktur, khususnya di satker teknis (Eselon II : 1 eselon 3 dan 1 eselon 4.).
 2. Pembentukan pengelola layanan TU kawasan → ada JF PPBJ disini, staf yang tadinya dipotong dari jabatan struktural tadi.
 3. Sentralisasi pengelola pengadaan di Biro Umum (UKPBJ)
 4. Peningkatan status posisi pengelola pengadaan kawasan, anggarannya ditambahin di kawasan agar dapat naik jenjang.
- Dampak reorganisasi dan redistribusi:
 1. Mempermudah mendapatkan angka kredit karena beban pekerjaannya yang meningkat
 2. Distribusi JF PPBJ lebih merata
 3. Pembinaan SDM JF PPBJ lebih mudah dilakukan
- Dampak dengan pembentukan JF PPBJ :
 1. Profesional – fokus ke tugas utama
 2. *Upgrade* kapaitas pegawai
 3. Mengubah perilaku dan budaya internal
- Dengan adanya reorganisasi → Diharapkan budaya melayani lebih tinggi

V. Diskusi

1. Saat kematangan lembaga PBJ sudah terverifikasi level 3, apa yang harus lakukan selanjutnya terhadap bukti-bukti dukung tersebut?

Jawab:

Pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ merupakan proses pembelajaran, sebaiknya adanya **perbaikan berkelanjutan**, sehingga dapat memberikan manfaat. Tingkat kematangan sebagai alat ukur PBJ bermanfaat bagi negara bangsa. Dapat meningkatkan ke level yang lebih tinggi.

2. Menarik mengenai pemberian *reward & punishment* bagi pokja sebagai wujud pengelolaan personel UKPBJ. Ijin berbagi dasar pelaksanaan & mekanisme penentuan keputusannya. Apakah ada sidang dll?

Jawab:

Ada pakta integritas untuk tender dan pakta integritas sendiri, jika ada pelanggaran ada sanksi. Merupakan kewenangan kepala biro untuk memberikan *reward*. Jadi merupakan kebijakan internal, dengan memberikan perjadin Luar Negeri.

3. Terkait steril dari orang yang menekan, bagaimana mengkondisikan hal tersebut?

Jawab:

Tekanan tidak banyak, tapi godaan yang banyak. Jika melanggar pakta integritas, maka dipindah.

4. Bagaimana meyakinkan pimpinan agar memberikan dukungan peningkatan SDM, pengalaman mengikuti kegiatan berkaitan dengan peningkatan SDM PBJ sulit mendapat persetujuan

Jawab:

Perlu adanya penyamaan frekuensi dengan pimpinan untuk menyampaikan bahwa PBJ tidak hanya sekedar tender, namun juga SDM yang profesional. Apalagi adanya amanat Perpres 16/2018 tentang pembentukan JF PPBJ. Jika tidak ada maka harus ada biaya untuk membayar agen pengadaan.

5. Terkait konsolidasi bantalan kereta, tidak semua pekerjaan dapat di konsolidasi. Konsolidasi dilakukan untuk pekerjaan dengan nilai paling sedikit 30 M. Kemudian untuk penandatanganan kontraknya masing-masing dengan 5 PPK 5 paket, dengan *single winner*.
6. Kebijakan remunerasi tidak sama, apakah ada standarisasi?

Jawab:

Remunerasi berdasarkan penilaian kinerja dari Kementerian PANRB dengan menilai RB yang sudah dilakukan termasuk zona integritas, pelayanan.

7. Trik motivasi ASN yang JFT untuk melakukan fungsinya non pokja.

Jawab:

- a. Mencoba metode pembelajaran di *outdoor*, metode *outbond* tematik PBJ.
 - b. Pelaksanaan diklat untuk meningkatkan kapasitas SDM, sejak 2 tahun diklat teknis dilengkapi dengan insentif berupa visitasi, studi lapangan keluar daerah.
 - c. Wajar JF PPBJ jika diberikan insentif lebih terkait dengan beban dan risiko, sehingga JF PPBJ setahun diberikan kapasitas bervariasi, perlu adanya dukungan dan komitmen pimpinan.
 - d. Memberikan biaya kuliah/pendidikan.
8. Terkait dengan tingkat kesejahteraan pokja, **rasa nyaman** yang diukur, tidak hanya materiil. Selain itu perlu membangun integritas.
 9. Pengurusan kendaraan (aset) apakah ada tusinya?

Jawab:

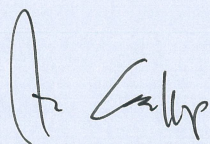
Sudah tercantum dalam juknis penyusunan anggaran dan memang ada nama kegiatan sendiri untuk pengadaan kendaraan dinas.

10. Dipanggil APH merupakan hal biasa. Terkait pemberian dokumen pengadaan, silahkan tanyakan pada Biro Hukum. Biasanya hanya diberikan *password* untuk mengunduh sendiri.
11. Honor dibebankan pada satker masing-masing dan untuk tambahan penghasilan pokja biayanya dari perjadiin untuk bertemu dengan pemenang.
12. Dalam Perpres 54 ada indikasi persengkongkolan, jika sudah ada indikasi sebaiknya dibatalkan di awal, dapat juga mengundang KPPU daerah untuk *sharing* mengenai indikasi persengkongkolan.
13. Dalam peningkatan level kelembagaan, dari 17 standar LPSE mempengaruhi 3 domain dan 5 variabel. Karena sebagian besar terkendala di standar LPSE, sebaliknya penuhi bukti dukung yang domain proses terlebih dahulu.

C. Motivator, Bapak Andrie Wongso

- Sukses adalah hak saya, anda, dan siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan sepenuh hati.
- Luar biasa adalah berani berbeda.
- Perkembangan suatu negara tidak tergantung Umur negara, Sumber Daya Alam, Ras Warna Kulit, melainkan di Sikap Mental.
- Untuk mewujudkan Indonesia maju, perlu mengubah sikap mental dan cara berpikir SDM Indonesia.
- Sukses butuh kesadaran mental.
- Miskin Mental dan Kaya Mental → Miskin mental terkait dengan sikap yang “negatif”, mental yang lemah, seperti malas, tidak disiplin, banyak mengeluh, takut perubahan, sulit beradaptasi, dan lain-lain. Sedangkan kaya mental terkait dengan sikap yang “positif”, seperti tanggung jawab, produktif, jujur, proaktif, dan lain-lain.
- 5 *power success*:
 1. Kekuatan pikiran → penuh keyakinan dapat mencapai tujuan, dengan mudah beradaptasi dan berani menghadapi perubahan. Jadilah orang yang optimis dan aktif.
 2. Kekuatan kemauan → berani menentukan target yang jelas dan konkrit.
 3. Kekuatan karakter → ketika seseorang kehilangan karakter, hilang semuanya.
 4. Kekuatan komitmen → menjalankan yang menjadi tugas, beban, tanggung jawab.
 5. Kekuatan determinasi → keuletan untuk menjalankan fungsi dan tugas.
- Jika lunak kepada diri sendiri, maka kehidupan akan keras kepada anda. Namun apabila anda keras kepada diri sendiri, maka kehidupan akan lunak kepada anda. Yang dimaksud lunak adalah miskin mental, sedangkan keras artinya kaya mental.

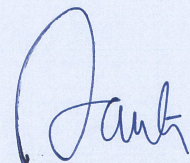
Mengetahui,
Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan



(Anita Carollin)

Jakarta, 7 November 2019

Notulis,



(Dewi Purbandari R)